

LAMPIRAN III
**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 90 TAHUN 2021
TENTANG**
PEMBANGUNAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI INSTANSI PEMERINTAH

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan
A.	PENGUNGKIT			60.00				59.74	99.57%	
	I.	PEMENUHAN		30.00				29.74	99.15%	
		1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4.00				4.00	100.00%	
			i. Penyusunan Tim Kerja	0.50				0.50	100.00%	
			a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas		Ya, jika Tim telah dibentuk di dalam unit kerja.	Ya/Tidak	Ya	1.00		Telah membentuk Tim ZI DPMPSTSP th 2019 sampai 2021. Pada Th 2022 SK Tim ZI diperbaharui menjadi SK Kepala Dinas nomor 503/11/DPMPSTSP/2022 tanggal 2 Februari 2022
			b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/ mekanisme yang jelas		a. Jika dengan prosedur/ mekanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja b. Jika sebagian menggunakan prosedur yang mewakili sebagian besar unsur dalam unit kerja c. Jika tidak di seleksi.	A/B/C	A	1.00		Rapat Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI pada tanggal 2 Februari 2022 dengan prosedur/ mekanisme
			ii. Rencana Pembangunan Zona Integritas	1.00				1.00	100.00%	
			a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM		Ya, jika memiliki rencana kerja pembangunan Zona Integritas.	Ya/Tidak	Ya	1.00		Rencana kerja ZI telah ditetapkan pada tgl 3 Februari 2022
			b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM		a. Jika semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM b. Jika sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM c. Jika tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM	A/B/C	A	1.00		Program prioritas ZI telah ditetapkan pada tgl 3 Februari 2022
			c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM		a. Jika telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan <i>stakeholder</i> secara berkala b. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif dilakukan secara terbatas dan tidak secara berkala c. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif belum dilakukan	A/B/C	A	1.00		Sosialisasi pada menu laporan melalui website dpmptsp.klungkungkab.go.id
			iii. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan	1.00				1.00	100.00%	

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan
			a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana		a. Jika semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana b. Jika sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana c. Jika sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana d. Jika belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana	A/B/C/D	A	1.00		Hasil Rencana Kerja Zona Integritas pada DPMPSTP Kabupaten Klungkung
			b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas		a. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan dilakukan secara berkala b. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan tetapi tidak secara berkala c. Jika monitoring dan evaluasi tidak melibatkan pimpinan dan tidak secara berkala d. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas	A/B/C/D	A	1.00		Kepala Dinas melakukan Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas pada DPMPSTP Kabupaten Klungkung
			c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti		a. Jika semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti b. Jika sebagian besar catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti c. Jika sebagian kecil catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti d. Jika catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti	A/B/C/D	A	1.00		Dokumen Tindak lanjut hasil evaluasi Pembangunan Zona Integritas Dinas PMPTSP Kab. Klungkung
			iv. Perubahan pola pikir dan budaya kerja	1.50				1.50	100.00%	
			a. Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM		ya, jika pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi.	Ya/Tidak	Ya	1.00		Kepala Dinas PMPTSP melakukan pembinaan kedisiplinan dan etika bekerja pada saat Apel Pagi dan memimpin pelaksanaan terkait pembangunan Zona Integritas
			b. Sudah ditetapkan agen perubahan		a. Jika agen perubahan telah ditetapkan dan berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya b. Jika agen perubahan telah ditetapkan namun belum berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya c. Jika belum terdapat agen perubahan	A/B/C	A	1.00		Telah menetapkan agen perubahan SK Kepala Dinas Nomor 503/12/DPMPSTP/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan perubahan antara lain pelayanan prima dengan 3S (senyum salam sapa) bagi frontliner yang bertugas di pelayanan dan penggunaan TTE pada setiap administrasi

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan
			c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi		a. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan b. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir tapi masih terdapat resistensi atas perubahan c. Jika belum terdapat upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir	A/B/C	A	1.00		Telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja antara lain dengan adanya Peraturan Bupati Klungkung nomor 14 Tahun 2021 tentang Kode Etik ASN, dengan perubahan antara lain pelayanan prima dengan 3S (senyum salam sapa)
			d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM		a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	A/B/C/D	A	1.00		Semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas salah satunya dengan penggunaan pin "malayani dengan sepenuh hati" oleh setiap pegawai
2. PENATAAN TATALAKSANA				3.50				3.50	100.00%	
			i. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan	1.00				1.00	100.00%	
			a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi		a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis c. Jika sebagian SOP unit telah mengacu peta proses bisnis d. Jika belum terdapat SOP unit yang mengacu peta proses bisnis	A/B/C/D	A	1.00		SOP yang ditetapkan telah mengacu pada Peta Proses Bisnis
			b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan		a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan organisasi e. Jika unit belum menerapkan SOP yang telah ditetapkan organisasi	A/B/C/D/E	A	1.00		Seluruh SOP yang telah ditetapkan nomor 313/16/HK/2021 tanggal 31 Mei 2021 telah diimplementasikan
			c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi		a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi e. Jika SOP belum pernah dievaluasi	A/B/C/D/E	A	1.00		telah dilakukan evaluasi atas SOP Tahun 2017 sehingga terbit SOP ditahun 2021 nomor 313/16/HK/2021 tanggal 31 Mei 2021. kemudian dievaluasi Tahun 2022 terkait adanya pendelegasian baru dan penyesuaian SOP terkait regulasinya terhadap UU Cipta Kerja.
			ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.00				2.00	100.00%	

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan
			a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi		a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance /e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance /e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi c. Jika belum memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance /e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi	A/B/C	A	1.00		Pengukuran kinerja dengan aplikasi e-kinerja untuk pembayaran tambahan penghasilan berbasis kinerja.
			b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi		a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat c. Jika belum menggunakan teknologi informasi dalam operasionalisasi manajemen SDM	A/B/C	A	1.00		Operasionalisasi manajemen SDM menggunakan aplikasi Simpeg dengan inovasi Simpeg SIAP GEMA SANTI
			c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi		a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpusat/unit sendiri dan terdapat inovasi b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara terpusat c. Jika belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi	A/B/C	A	1.00		Pemberian pelayanan dengan menggunakan aplikasi OSS sejak November Th 2018 untuk layanan perizinan berusaha seperti izin pariwisata dan perdagangan, dan aplikasi SICANTIK bagi pelayanan perizinan yang tidak terlayani di OSS sejak Januari 2019 seperti izin reklasme, izin kesehatan, bangunan gedung, dll yang non berusaha
			d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik		a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan tetapi tidak secara berkala c. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	A/B/C	A	1.00		Layanan Online berupa oss.go.id dan sicanik.go.id sehingga bisa diakses bebas oleh masyarakat. Laporan movev terhadap layanan OSS tidak ada karena ini buatan pusat dan untuk layanan Sicanik juga sama karna buatan pusat juga. Tetapi bila terjadi masalah mungkin karena koneksi internet saja 1 sampai 2 jam perbaikan. Koneksi juga di cover 2 layanan internet yaitu koneksi telkom dan koneksi provider dari Dinas Kominfo Klungkung
			iii. Keterbukaan Informasi Publik	0.50				0.50	100.00%	
			a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan		a. Jika sudah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap b. Jika sudah terdapat PPID yang menyebarkan sebagian informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap c. Jika belum ada PPID dan belum melakukan penyebaran informasi publik	A/B/C	A	1.00		1)Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung Nomor 503/15/DPMPPTSP/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung. 2)Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung Nomor 555/08/DPMPPTSP/2020 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung.

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan
			b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik		a. Jika dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti b. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilakukan tetapi belum ditindaklanjuti c. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik belum dilakukan	A/B/C	A	1.00		Telah dilakukan monev keterbukaan informasi publik secara berkala
			3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5.00				4.93	98.63%	
			i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	0.25				0.25	100.00%	
			a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan		Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan.	Ya/Tidak	Ya	1.00		Kebutuhan pegawai mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis masing-masing jabatan yang namanya anjab menjadi informasi jabatan
			b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan		a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan d. Jika penempatan pegawai hasil rekrutmen murni tidak mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	A/B/C/D	A	1.00		Penempatan pegawai hasil rekrutmen mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun. Ada CPNS hasil rekrutmen yaitu Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama dan di tempatkan sesuai dengan SK penempatannya
			c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja		Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja.	Ya/Tidak	Ya	1.00		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai
			ii. Pola Mutasi Internal	0.50				0.50	100.00%	
			a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan		Ya, jika dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai.	Ya/Tidak	Ya	1.00		dilakukan mutasi sesuai kebutuhan dan pengembangan karier

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan
			b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan		a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi e. Jika mutasi pegawai antar jabatan belum memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi	A/B/C/D/E	A	1.00		Mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi.
			c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja		Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.	Ya/Tidak	Ya	1.00		telah dilakukan Monev mutasi dengan hasil memperbaiki kinerja
			iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	1.25				1.18	94.50%	
			a. Unit Kerja melakukan <i>Training Need Analysis</i> Untuk pengembangan kompetensi		Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi.	Ya/Tidak	Ya	1.00		Telah disusun rencana Pengembangan Kompetensi
			b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai		a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai d. Jika belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	A/B/C/D	A	1.00		Rencana pengembangan kompetensi pegawai telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan
			c.	Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan	<p>a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25%</p> <p>b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50%</p> <p>c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50% -75%</p> <p>d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >75%-100%</p>	A/B/C/D	B	0.67		Kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi adalah kurang dari 25 persen
			d.	Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	<p>a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya</p> <p>b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya</p> <p>c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya</p> <p>d. Jika belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya</p>	A/B/C/D	A	1.00		Pegawai telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
			e.	Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, <i>in-house training</i> , coaching, atau mentoring)	<p>a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai</p> <p>b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai</p> <p>c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai</p> <p>d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai</p>	A/B/C/D	A	1.00		Telah dilakukan upaya pengembangan kompetensi pegawai salah satunya melalui Bimbingan melalui webinar/seminar online
			f.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	<p>a. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala</p> <p>b. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan namun tidak secara berkala</p> <p>c. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum dilakukan</p>	A/B/C	A	1.00		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi namun tidak secara berkala
			iv.	Penetapan Kinerja Individu				2.00	100.00%	

				Penilaian	Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan
				a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi		a. Jika seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP) b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi d. Jika belum ada penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi	A/B/C/D	A	1.00		Penetapan kinerja individu telah terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP)
				b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya		a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya serta menggambarkan <i>logic model</i> b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya d. Jika ukuran kinerja individu belum memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	A/B/C/D	A	1.00		Pengukuran kinerja individu telah dilakukan setiap bulan melalui aplikasi sirebangda dan e-kinerja
				c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik		a. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan e. Jika pengukuran kinerja individu belum dilakukan	A/B/C/D/E	A	1.00		Pengukuran kinerja individu telah dilakukan setiap bulan melalui aplikasi sirebangda dan e-kinerja
				d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian <i>reward</i>		Ya, jika hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian <i>reward</i> (Seperti: pengembangan karir individu, atau penghargaan)	Ya/Tidak	Ya	1.00		Penilaian kinerja individu digunakan sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan melalui aplikasi e-kinerja
				v. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	0.75				0.75	100.00%	

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan
			a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan		a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi d. Jika unit kerja belum mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi	A/B/C/D	A	1.00		Telah dilakukan penerapan kode etik dengan Peraturan bupati nomor 14 tahun 2021 tentang tentang Kode Etik ASN di Pemkab Klungkung, Keputusan Kepala Dinas PMPTSP nomor 503/15/DPMPPTSP/2018 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas PMPTSP dan penerapan disiplin salah satunya dengan absen retina dan dengan aplikasi absensi online/Sisenso.
			vi. Sistem Informasi Kepegawaian	0.25				0.25	100.00%	
			a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala		a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan namun secara berkala c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja belum dimutakhirkan	A/B/C	A	1.00		Informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai dengan aplikasi Simpeg online dan Simpeg Siap Gema Santi
			4. Penguatan Akuntabilitas	5.00				5.00	100.00%	
			i. Keterlibatan Pimpinan	2.50				2.50	100.00%	
			a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan		a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perencanaan b. Jika pimpinan ikut terlibat dalam sebagian tahapan penyusunan perencanaan c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam <u>penyusunan perencanaan (hanya menandatangani)</u>	A/B/C	A	1.00		Kepala Dinas dan Sekretaris terlibat dalam penyusunan perencanaan
			b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja		a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perjanjian kinerja b. Jika pimpinan terlibat dalam sebagian tahapan penyusunan perjanjian kinerja c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perjanjian kinerja	A/B/C	A	1.00		Kepala Dinas dan Sekretaris terlibat dalam penyusunan Perjanjian Kinerja
			c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala		a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan b. Jika pimpinan unit kerja terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja tetapi tidak ada tindak lanjut hasil pemantauan c. Jika pimpinan unit kerja terlibat dalam sebagian pemantauan pencapaian kinerja d. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam pemantauan pencapaian kinerja	A/B/C/D	A	1.00		Kepala Dinas dan Sekretaris terlibat pemantauan capaian kinerja (CIK/evaluasi Kinerja) dan hasil tindaklanjutnya
			ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	2.50				2.50	100.00%	

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan
			a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada		ya, jika unit kerja memiliki dokumen perencanaan kinerja lengkap	Ya/Tidak	Ya	1.00		Telah terdapat dokumen perencanaan berupa Renstra, Renja, DPA SKPD
			b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil		ya, jika perencanaan kinerja telah berorientasi hasil	Ya/Tidak	Ya	1.00		Dokumen perencanaan berupa Renja dan DPA telah berorientasi hasil
			c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)		ya, jika unit kerja memiliki IKU	Ya/Tidak	Ya	1.00		telah terdapat IKU sesuai dengan Peraturan Bupati Klungkung nomor 37 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja utama Pemerintah
			d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART		a. Jika seluruh indikator kinerja telah SMART b. Jika sebagian besar indikator kinerja telah SMART c. Jika sebagian kecil indikator kinerja telah SMART d. Jika belum ada indikator kinerja yang SMART	A/B/C/D	A	1.00		indikator kinerja unit kerja telah SMART
			e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu		Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu	Ya/Tidak	Ya	1.00		Laporan kinerja telah disusun tepat waktu
			f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja		a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja b. Jika sebagian pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja c. Jika seluruh pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja	A/B/C	A	1.00		Laporan kinerja memberi informasi kinerja
			g. Terdapat sistem informasi/mechanisme informasi kinerja		ya, jika terdapat sistem informasi/mechanisme informasi kinerja	Ya/Tidak	Ya	1.00		Sosialisasi SAKIP untuk peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
			h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja		a. Jika seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja kompeten b. Jika sebagian SDM pengelola akuntabilitas kinerja kompeten c. Jika seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja belum ada yang kompeten	A/B/C	A	1.00		Sosialisasi SAKIP untuk peningkatan kapasitas SDM seluruh pegawai DPMPSTP
			5. Penguatan Pengawasan	7.50				7.31	97.50%	
			i. Pengendalian Gratifikasi	1.50				1.50	100.00%	

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan
			a. Telah dilakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi		a. Jika <i>public campaign</i> telah dilakukan secara berkala b. Jika <i>public campaign</i> dilakukan tidak secara berkala c. Jika belum dilakukan <i>public campaign</i>	A/B/C	A	1.00		<i>public campaign</i> telah dilakukan secara berkala melalui informasi front office bahwa semua perizinan gratis kecuali yang ada retribusinya IM dan pajak Reklame
			b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan		a. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur b. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, upaya pengendalian gratifikasi telah mulai dilakukan c. Jika telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi tetapi belum terdapat prosedur pengendalian d. Jika belum memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi	A/B/C/D	A	1.00		Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan dengan pelaporan gratifikasi secara rutin ke Unit Pengendalian Gratifikasi dan pemetaan area rawan gratifikasi di unit kerja
			ii. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1.50				1.31	87.50%	
			a. Telah dibangun lingkungan pengendalian		a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi e. Jika unit kerja belum membangun lingkungan pengendalian	A/B/C/D/E	B	0.75		Telah dibangun lingkungan pengendalian oleh Satgas SPIP yg ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP nomor 700/11/DPMPPTSP/2019 tentang Pembentukan Satuan Tugas SPIP di Lingkungan Dinas PMPTSP

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan
			b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan		a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi e. Jika unit kerja belum melakukan penilaian resiko	A/B/C/D/E	B	0.75		Telah dilakukan penilaian risiko organisasi yang dituangkan dalam daftar risiko/risk register
			c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi		a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko	A/B/C	A	1.00		Kegiatan Pengendalian telah dilakukan sesuai dengan rencana tindak pengendalian yang telah disusun
			d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait		a. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait c. Jika SPI belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak terkait	A/B/C	A	1.00		Kegiatan Pengendalian telah dilakukan sesuai dengan rencana tindak pengendalian yang telah disusun
			iii. Pengaduan Masyarakat	1.50				1.50	100.00%	
			a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan		a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat	A/B/C	A	1.00		Telah mengimplementasikan kebijakan Pengaduan dengan penunjukan petugas penanganan pengaduan dan menyediakan media pengaduan online melalui web OPD, klungkung mesadu, SP4N LAPOR dan pengaduan offline
			b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti		ya,pengaduan masyaakat ditindaklanjuti	Ya/Tidak	Ya	1.00		Pengaduan yang ditindaklanjuti

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan
			c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat		a. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tetapi tidak secara berkala c. Jika penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi	A/B/C	A	1.00		laporan Monev pengaduan secara berkala setiap bulan <hr/> <p style="text-align: center;">KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR : 221 TAHUN 2017</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN PENGADUAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
			d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja c. Jika hasil evaluasi atas penanganan pengaduan belum ditindaklanjuti	A/B/C	A	1.00		Laporan ditindaklanjuti pengaduan hasil monev
			iv. Whistle-Blowing System	1.50				1.50	100.00%	
			a. <i>Whistle Blowing System</i> telah diterapkan		a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan <i>Whistle Blowing System</i> sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i> yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja menerapkan kebijakan <i>Whistle Blowing System</i> sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja belum menerapkan kebijakan <i>Whistle Blowing System</i>	A/B/C	A	1.00		Penerapan WBS melalui website dan terdapat ruangan khusus layanan pengaduan yang tertutup. Keamanan pelapor akan terjamin. Sosialisasi mekanisme WBS
			b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i>		a. Jika penerapan <i>Whistle Blowing System</i> dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Jika penerapan <i>Whistle Blowing System</i> dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Jika penerapan <i>Whistle Blowing System</i> belum di monitoring dan evaluasi	A/B/C	A	1.00		WBS telah diterapkan dengan aplikasi WBS pada website resmi Pemkab Klungkung wbs.klungkungkab.go.id
			c. Hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti		a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti oleh unit kerja b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti oleh unit kerja c. Jika hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> belum ditindaklanjuti	A/B/C	A	1.00		Telah dilakukan Monev WBS namun tidak secara berkala
			v. Penanganan Benturan Kepentingan	1.50				1.50	100.00%	

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan
			a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama		a. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan pada seluruh tugas fungsi utama b. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian besar tugas fungsi utama c. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian kecil tugas fungsi utama d. Jika belum terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	A/B/C/D	A	1.00		Telah dilakukan identifikasi benturan kepentingan di DPMPSTSP
			b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi		a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/diinternalisasikan ke seluruh layanan b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/diinternalisasikan ke sebagian besar layanan c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/diinternalisasikan ke sebagian kecil layanan d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan/diinternalisasikan ke seluruh layanan	A/B/C/D	A	1.00		Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan ke semua pegawai DPMPSTSP
			c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan		a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh layanan b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar layanan c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil layanan d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh layanan	A/B/C/D	A	1.00		Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan ke layanan DPMPSTSP
			d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan		a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tetapi tidak secara berkala oleh unit kerja c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja	A/B/C	A	1.00		Evaluasi setiap triwulan untuk penanganan benturan kepentingan di DPMPSTSP
			e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti		a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja b. Jika sebagian hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja c. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja	A/B/C	A	1.00		Tindaklanjuti untuk penanganan benturan kepentingan di DPMPSTSP
			6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5.00				5.00	100.00%	
			i. Standar Pelayanan	1.00				1.00	100.00%	

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan
			a. Terdapat kebijakan standar pelayanan		a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku b. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku c. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku e. Standar Pelayanan belum ditetapkan	A/B/C/D/E	A	1.00		Terdapat kebijakan standar pelayanan dengan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP nomor 503/14/DPMPSTSP/2019 tentang Standar Pelayanan pada Dinas PMPTSP
			b. Standar pelayanan telah dimaklumkan		a. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan di website dan media lainnya b. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website c. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil jenis pelayanan dan belum dipublikasikan d. Standar pelayanan belum dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan belum dipublikasikan	A/B/C/D	A	1.00		Standar Pelayanan telah dimaklumkan
			c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan		a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, namun dilakukan tanpa memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, serta tanpa melibatkan stakeholders d. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	A/B/C/D	A	1.00		Reviu standar pelayanan dengan melakukan Forum Konsultasi Publik
			d. telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan		ya, telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan	Ya/Tidak	Ya	1.00		Publikasi standar Pelayanan dan maklumat pelayanan di websaite dpmpstsp.klungkungkab.go.id
			ii. Budaya Pelayanan Prima	1.00				1.00	100.00%	

				Penilaian	Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan
				a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima		a. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan serta telah dan terdapat monev yang melihat kemampuan/kecakapan petugas/pelaksana layanan b. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan c. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, akan tetapi baru sebagian besar petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan d. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima namun secara terbatas, sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana layanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan e. Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh petugas/pelaksana layanan belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan	A/B/C/D/E	A	1.00		Telah dilakukan pelatihan budaya pelayanan prima dengan melibatkan Bank BPD Bali Cabang Klungkung tanggal 10 April 2019
				b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media		a. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional b. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial), namun belum terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional c. Seluruh Informasi tentang pelayanan belum online, hanya dapat diakses di tempat layanan (intranet dan non elektronik) d. Informasi tentang pelayanan sulit diakses	A/B/C/D	A	1.00		Informasi Pelayanan dapat diakses melalui website DPMPSTSP, seperti layanan OSS dan Sicanik bisa di akses melalui web dpmptsp.klungkungkab.go.id
				c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan		a. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan secara rutin/berkelanjutan b. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, namun belum diterapkan secara rutin/berkelanjutan c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi, namun belum memenuhi unsur penilaian minimal : disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan d. Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi	A/B/C/D	A	1.00		Telah terdapat pemberian reward/sanksi bagi pelaksana layanan

				<i>Penilaian</i>	<i>Bobot</i>	<i>Penjelasan</i>	<i>Pilihan Jawaban</i>	<i>Jawaban</i>	<i>Nilai</i>	<i>%</i>	<i>Catatan/Keterangan/Penjelasan</i>
				d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar		a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan b. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian besar jenis layanan c. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian kecil jenis layanan d. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar	A/B/C/D	A	1.00		Layanan kompensasi bila tidak sesuai standar pelayanan
				e. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi		a. Jika seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi b. Jika sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi c. Jika sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi d. Jika tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu/terintegrasi	A/B/C/D	A	1.00		Telah terdapat sarana layanan terpadu dengan aplikasi OSS dan SICANTIK
				f. Terdapat inovasi pelayanan		a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat serta telah direplikasi b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat c. Jika unit kerja memiliki inovasi yang merupakan replikasi dan pengembangan dari inovasi yang sudah ada d. Jika unit kerja telah memiliki inovasi akan tetapi merupakan pelaksanaan inovasi dari instansi pemerintah e. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan	A/B/C/D/E	A	1.00		Telah memiliki inovasi pelayanan berupa PROAJI yaitu Program Layanan Antar Jemput Ijin
				iii. Pengelolaan Pengaduan	1.00				1.00	100.00%	

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan
			a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!		a. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! b. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! c. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, namun belum tersedia petugas khusus yang menangani d. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline e. Tidak terdapat media konsultasi dan pengaduan	A/B/C/D/E	A	1.00		pada website dpmptsp.klungkungkab.go.id terdapat link pengaduan SP4M LAPOR dan terdapat admin khusus DPMPSTSP untuk penanganan SP4M LAPOR
			b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan		a. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja b. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja, namun unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan belum ada c. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja	A/B/C	A	1.00		Terdapat ruangan khusus layanan konsultasi dan pengaduan serta SK Kadis tentang petugas layanannya
			c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi		a. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan tidak berkala c. Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	A/B/C	A	1.00		Terdapat laporan penangan pengaduan, monev, dan hasil tindaklanjut setiap bulannya
			iv. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	1.00				1.00	100.00%	
			a. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan		a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 3 kali dalam setahun c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun d. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun e. Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	A/B/C/D/E	A	1.00		Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan 4 kali dalam setahun

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan
			b.	Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website, media sosial, dll) dan offline b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara offline di tempat layanan c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi	A/B/C	A	1.00		Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online melalui website dpmptsp.klungkungkab.go.id dan papan pengumuman
			c.	Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	a. Jika dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat b. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan masyarakat c. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei kepuasan masyarakat d. Jika belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	A/B/C/D	A	1.00		tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat
			v.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.00			1.00	100.00%	
			a.	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	a. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian besar proses pemberian layanan c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian kecil proses pemberian layanan d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi pada proses pemberian pelayanan	A/B/C/D	A	1.00		Semua proses pelayanan perizinan semuanya menggunakan teknologi informasi yaitu oss.go.id dan sicantik.go.id
			b.	Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi	Ya,jika tela membangun database pelayanan yang terintegrasi	Ya/Tidak	Ya	1.00		Pelayanan Perizinan menggunakan database pusat
			c.	Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan	A/B/C	A	1.00		Perbaikan terus menerus dari segi kemudahan layanan
			II.	REFORM	30.00			30.00	100.00%	
			1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4.00			4.00	100.00%	
			i.	Komitmen dalam perubahan	2.00			2.00	100.00%	
			a.	Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun)	Misalkan dengan kebijakan 1 Agen 1 Perubahan Persentase diperoleh dari Jumlah Perubahan yang dibuat dibagi dengan Jumlah Agen Perubahan	%	100.00%	1.00		
				- Jumlah Agen Perubahan		Jumlah	5			DPMPTSP memiliki 3 orang agen perubahan yang telah diformalkan dalam SK Kepala Dinas Kabupaten Klungkung Nomor 503/12/DPMPTSP/2021 tanggal 2 Februari 2022

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan
			- Jumlah Perubahan yang dibuat			Jumlah	5			Perubahan yang dibuat: 1) penanaman nilai budaya disiplin dengan pelayanan perizinan yang cepat. Outputnya adalah Pemohon dilayani dengan baik 2) Publikasi penilaian SKM . Outputnya service layanan konsultasi dan pengaduan menjadi lebih baik, 3) Pelaporan kegiatan penanaman modal yang tepat sasaran Outputnya pemahaman pemohon meningkat atas kesadaran dalam pelaporan penanaman modal.
			b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen			%	100.00%	1.00		
			- Jumlah Perubahan yang dibuat			Jumlah	5			Perubahan yang sudah dibuat selama ini adalah 1. penerapan budaya 3S di front office, 2) digitalisasi layanan; 3) penerapan klinik LKPM
			- Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen			Jumlah	5			Perubahan yang telah terintegrasi : 1. penerapan budaya 3S di front office sejak tahun 2021 Telah meningkatkan respon penyelesaian layanan, meningkatkan kepuasan masyarakat pada aspek keramahan (Nilai SKM 2019 adalah 80,20 Nilai SKM 2020 adalah 80,77 Nilai SKM Tahun 2021 adalah 82,69 2) digitalisasi layanan telah berhasil mempercepat penyelesaian layanan dari sebelumnya 3 hari menjadi 1 hari pada Rekomendasi Penelitian. pada Izin usaha beresiko rendah dari 3 hari menjadi 1 hari 3) penerapan klinik LKPM hasilnya kepatuhan dalam pelaporan. Dilaksanakan sejak 2019 telah mampu menghasilkan 3 inovasi/perbaikan yaitu sbb : Sistem Perzinan Online Inovasi Proaji, Asip Online, Klinik LKPM.
			ii. Komitmen Pimpinan	1.00				1.00	100.00%	
			- Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan		a. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai b. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian (diatas 50%) sudah tercapai c. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian kecil (dibawah 50%) sudah tercapai d. Target capaian zona integritassudah ada di dokumen perencanaan unit kerja, namun belum ada yang tercapai (masih dalam tahap pembangunan) e. Tidak ada target capaian zona integritasdi dokumen perencanaan unit kerja	A/B/C/D/E	A	1.00		Target indeks reformasi birokrasi sudah tercantum dalam renja, RKA, DPA sebagai indikator kinerja kegiatan dan menjadi perjanjian kinerja sekretaris dinas. Target 36,30 %, realisasi 27,42 % Capaian 75,54 %
			iii. Membangun Budaya Kerja	1.00				1.00	100.00%	

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan
			-	Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari	a. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas b. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, namun belum dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas c. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah disusun, namun belum diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi d. Belum menyusun budaya kerja dan nilai-nilai organisasi	A/B/C/D	A	1.00		Budaya kerja BerAKHLAK yang telah terinternalisasi adalah : Berorientasi pelayanan artinya pemenuhan pelayanan yang ramah cepat dan melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel yang artinya jujur, menolak segara bentuk gratifikasi dan tidak menggunakan wewenang jabatan. Kompeten artinya melaksanakan pelayanan dengan kualitas terbaik. Harmonis artinya membangun pelayanan yang kondusif. Loyal artinya menjaga nama baik DPMPSTSP. Adakif artinya cepat dalam perubahan regulasi tentang pelayanan perizinan, berinovasi layanan perizinan ke arah lebih baik. Kolaboratif artinya terbuka, mengerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama dan menghasilkan nilai tambah. Penerapan Kolaboratif dilakukan dengan bersama-sama melaksanakan kegiatan pelayanan prima dalam pelaksanaan pelayanan
2. PENATAAN TATALAKSANA				3.50				3.50	100.00%	
i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi				0.50				0.50	100.00%	
			-	Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan	a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan seluruh jabatan b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan c. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian kecil (kurang dari 50%) jabatan d. Peta proses bisnis telah disusun dan belum mempengaruhi penyederhanaan jabatan	A/B/C/D	A	1.00		Penyusunan peta proses bisnis yang mempengaruhi penyederhanaan seluruh jabatan sesuai dengan Permendagri 25 tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Usulan penyederhanaan birokrasi didasarkan pada peta jabatan dan peta proses bisnis yang dibuat. Di Tahun 2021 Struktur Organisasi DPMPSTSP menjadikan Jabatan Struktural hanya 3 yaitu Kepala Dinas, Sekretaris, Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk sisanya menjadi kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal dan Kelompok Jabatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				1.00				1.00	100.00%	
			a	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	A/B/C	A	1.00		Penerapan SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien yaitu pada sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach)/OSS Berbasis Resiko dimana pada sistem tersebut telah terintegrasi dengan Pajak dalam hal NPWP dari pemohon ijin, dimana setiap permohonan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS harus mengentry NPWP pemohon tersebut apabila NPWP telah/sudah pernah digunakan dalam permohonan NIB maka otomatis sistem akan menolak permohonan itu.
			b	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien	a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien	A/B/C	A	1.00		Penerapan TTE telah terintegrasi pada Penerbitan Perizinan. Setiap BackOffice dan Tim Perizinan telah memiliki user masing masing dan bisa di akses dari mana saja secara online untuk verifikasi proses perizinan. Sehingga ini akan menjadikan proses lebih cepat dan efisien dimana pelayanan pengiriman Dokumen lebih efisien dengan mengurangi biaya BBM, mempersingkat waktu dan mengurangi biaya ATK. Penerapan TTE mengefisiensi ATK dan mempersingkat waktu penandatanganan dokumen/naskah dinas.
iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat				2.00				2.00	100.00%	

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan
			a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan	A/B/C/D/E	A	1.00		Transformasi Digital melalui pelayanan perizinan online yaitu oss.go.id dan sicantikui.layanan.go.id, dimana manfaat dari pada sistem pelayanan perijinan tersebut adalah dari segi waktu yang lebih efisien karena pemohon bisa mengajukan permohonan dari rumah nya menggunakan akun yang sudah diperoleh tanpa mesti datang ke kantor dan disamping itu juga dengan adanya aplikasi tersebut maka proses perijinan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan sistem yang konvensional/manual. Sehingga ini akan sesuai dengan proses bisnisnya yaitu memudahkan dan meningkatkan minat investasi di Kabupaten Klungkung dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
			b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan	A/B/C/D/E	A	1.00		Penerapan TTE memberi dampak pada efisiensi ATK, BBM dan mempercepat waktu penandatanganan, meningkatkan kemampuan teknis SDM dalam menggunakan teknologi informasi, mendorong penerapan e-arsip.

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan
			c. Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan	A/B/C/D/E	A	1.00		Terpenuhinya Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan melalui pelayanan perizinan online dan tanda tangan digital perizinan. manfaat dari sistem pelayanan perizinan OSS dan Sicanik yaitu mempermudah dalam proses perijinan di mana waktu yang diperlukan lebih efisien dan juga dengan sistem tersebut pemohon bisa melakukan pendaftaran dari tempatnya sendiri menggunakan akun yang telah diperoleh.
			3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5.00				5.00	100.00%	
			i. Kinerja Individu	1.50				1.50	100.00%	
			a Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (<i>outcome</i>) sesuai pada levelnya		a. Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (<i>outcome</i>) sesuai pada levelnya b. Sebagian ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (<i>outcome</i>) sesuai pada levelnya c. Tidak ada ukuran kinerja individu yang berorientasi hasil (<i>outcome</i>)	A/B/C	A	1.00		Perjanjian kinerja dan SKP pegawai diambil dari pohon kinerja yang disusun PD sesuai dgn levelnya. Misal untuk kepala OPD sudah pada level <i>outcome/impact</i> yaitu Meningkatkan Minat Investasi di Kabupaten K Lungkung dan Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten K Lungkung dgn target 80% , Kabid yang bertugas Ditetapkan sasaran PK yaitu Meningkatkan efektifitas
			ii. Assessment Pegawai	1.50				1.50	100.00%	
			a Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai		a. Seluruh hasil <i>assessment</i> dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai b. Hasil <i>assessment</i> belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai c. Hasil <i>assessment</i> belum dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai	A/B/C	A	1.00		Assesment pegawai terakhir dilaksanakan pada DPMPSTP hasilnya mutasi internal dan direkomendasikan sbg berikut perpindahan posisi staf menjadi posisi yang lebih kompeten dalam hal pelayanan perizinan. rekomendasi telah ditindaklanjuti sebagai berikut : Pada tahun 2022 telah dilakukan mutasi internal. Pada tahun 2019 sampai dengan 2021 terjadi pandemi sehingga perencanaan pengembangan tidak berjalan sesuai kebutuhan akan tetapi telah dilakukan pengembangan kompetensi teknis melalui seminar/webinar dan pembelajaran sifilit
			iii. Pelanggaran Disiplin Pegawai	2.00				2.00	100.00%	
			a Penurunan pelanggaran disiplin pegawai		Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun ini kemudian dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya	%	100.00%	1.00		
			- Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya			Jumlah	0			Tidak ada pelanggaran yang terjadi
			- Jumlah pelanggaran tahun ini			Jumlah	0			Tidak ada pelanggaran yang terjadi

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan
			- Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman			Jumlah	0			Tidak ada pelanggaran yang terjadi
		4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5.00				5.00		
		i.	Meningkatnya capaian kinerja unit kerja	2.00				2.00	100.00%	
			- Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih		Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja	%	100.00%	1.00		
			- Jumlah Sasaran Kinerja			Jumlah	18			18 Sasaran kinerja pada Capaian Indikator Kinerja terlihat peningkatan dalam setiap bulannya
			- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih			Jumlah	18			18 Sasaran kinerja tercapai 100% pada akhir Tahun
		ii.	Pemberian Reward and Punishment	1.50				1.50	100.00%	
			- Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi		a. Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i> b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i> c. Sebagian kecil Capaian Kinerja (kurang dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i> d. Capaian Kinerja (Perjanjian kinerja) belum menjadi unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i>	A/B/C/D	A	1.00		Capaian kinerja / Perjanjian Kinerja menjadi dasar pemberian Reward dan capaian disiplin pegawai mejadi dasar pemberian punishment
		iii.	Kerangka Logis Kinerja	1.50				1.50	100.00%	
			- Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai?		a. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai b. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi namun belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai c. Kerangka Logis kinerja ada namun belum mengacu pada kinerja utama organisasi dan belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai d. Kerangka Logis kinerja belum ada	A/B/C/D	A	1.00		Penilaian sasaran kinerja pegawai sudah melalui penjejangn dari Perjanjian Kinerja Utama (Kadis) sarannya akan di turunkan ke esl III dan Jabatan Fungsional hasil Penyetaraan menjadi indikator Perjanjian Kinerja. Untuk sasaran esl III akan menjadi indikator dari perjanjian kinerja esl IV. untuk sasaran esl IV akan menjadi indikator pada perjanjian kinerja jabatan pelaksana.
		5.	PENGUATAN PENGAWASAN	7.50				7.50	100.00%	
		i.	Mekanisme Pengendalian	2.50				2.50	100.00%	

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan
			- Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang		a. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja dan telah menghasilkan peningkatan kinerja, mekanise kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendali b. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja namun belum berdampak pada peningkatan kinerja unit kerja c. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas d. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi tetapi tidak tersistem e. Tidak terdapat pengendalian atas aktivitas utama organisasi	A/B/C/D/E	A	1.00		Pengendalian aktifitas dari perencanaan melalui aplikasi sirenbanda. Proses pelaporan pengendalian aktifitas ekinerja dimana dari proses input aktifitas kinerja masuk ke atasan untuk esl IV diverifikasi oleh Sekretaris, untuk esl III dan semua Jabatan Fungsional di verifikasi oleh Kadis. Sehingga aktifitas kinerja terkontrol pelaporannya dan hasil dari Capaian disiplin dan Laporan kinerja akan di evaluasi ke TPP.
			ii. Penanganan Pengaduan Masyarakat	3.00		%		3.00	100.00%	
			- Persentase penanganan pengaduan masyarakat		Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan	%	100.00%	1.00		
			- Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti			Jumlah	1			sebanyak 1 pengaduan melalui SP4M LAPOR berupa Pencanaan Pembangunan MPP dilakukan di Nusa Penida untuk memudahkan pengurusan perizinan.
			- Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses			Jumlah	0			Seluruh pengaduan telah di proses
			- Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti			Jumlah	1			telah selesai dengan cara pengaduan tersebut di balas dan di informasikan terkait Pembangunan MPP dilakukan di Pusat Pemerintahan dan didasari oleh permenpan rb nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan MPP. Dan menginformasikan bahwa untuk pengurusan perizinan sudah Online.
			iii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan	2.00		%		2.00	100.00%	
			i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	1.00				1.00		
			- Persentase penyampaian LHKPN		Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005	%	100.00%	1.00		
			- Jumlah yang harus melaporkan			Jumlah	1.00			
			- Kepala satuan kerja			Jumlah	1.00			1 laporan LHKPN yaitu Kepala Dinas

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan
			- Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN			Jumlah	0.00			1 laporan LHKPN yaitu Kepala Dinas
			- Lainnya			Jumlah	0.00			Tidak ada
			- Jumlah yang sudah melaporkan			Jumlah	1.00			1 laporan LHKPN yaitu Kepala Dinas
			Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	1.00				1.00		
			- Persentase penyampaian LHKASN		Penyampaian LHKASN diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015	%	100.00%	1.00		
			- Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)			Jumlah	30.00			
			- Pejabat administrator (eselon III)			Jumlah	1.00			1 laporan LHKASN yaitu sekretaris
			- Pejabat Penawas (eselon IV)			Jumlah	1.00			1 laporan LHKASN yaitu Kasubbag Umum dan Kepegawaian
			- Jumlah Fungsional dan Pelaksana			Jumlah	28.00			28 laporan LHKASN yaitu Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
			- Jumlah yang sudah melaporkan			Jumlah	30.00			30 laporan LHKASN semua pegawai
			6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5.00				5.00	100.00%	
			i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik	2.50				2.50	100.00%	
			a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesesuaian Persyaratan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana/ Web 7. Perilaku Pelaksana/ Web 8. Kualitas Sarana dan prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan		a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik yang prima (lebih Cepat dan mudah) b. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum seluruhnya memberikan dampak pada perbaikan pelayanan public yang prima (Cepat dan mudah) c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan d. Belum ada inovasi	A/B/C/D	A	1.00		Pelayanan langsung ke kecamatan setiap bulannya ini akan memudahkan pemohon perizinan dari segi waktu, biaya, dan pelaksanaannya sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan mudah
			b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat 2. Pelayanan Publik yang terpadu 3. Alur lebih pendek/singkat 4 Terintegrasi dengan aplikasi		Persentase diperoleh dari Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah dibagi dengan Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar	%	100.00%	1.00		

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan
			- Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar			Jumlah	1			Terdapat 68 layanan perizinan dan nonperizinan
			- Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah			Jumlah	1			Terdapat 68 layanan perizinan dan nonperizinan dengan semuanya online dan terpadu sehingga memudahkan pemohon dalam proses perizinan, bisa mengecek langsung, tidak perlu ke kantor DPMPSTSP, dan persyaratan lebih mudah
		ii.	Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi	2.50				2.50	100.00%	
			- Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab		a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui berbagai kanal/media b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui kanal/media yang terbatas c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui berbagai kanal/media d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan kanal/media terbatas	A/B/C/D	A	1.00		Respon Pelayanan konsultasi melalui FB dan melalui SP4M LAPOR
TOTAL PENGUNGKIT									59.74	
B.	HASIL			40.00				34.59	86.48%	
	I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL			22.50				20.11	89.39%	
	a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)		17.50	Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Anti Korupsi (Indeks Persepsi Anti Korupsi / IPAK)	Nilai (0-4)	3.74	16.36		Nilai interval 3,43
	b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya		5.00	a. Target kinerja utama tercapai lebih dari 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya serta lebih baik dari capaian kinerja nasional/rata-rata capaian kinerja unit yang sejenis; b. Target kinerja utama tercapai 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya; c. Target kinerja utama tercapai 100% atau lebih, namun tidak lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya; d. Kinerja utama sudah orientasi hasil akan tetapi	A/B/C/D/E	B	3.75		
	II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA			17.50				14.48	82.75%	
	a	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)		17.50	Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan (Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	Nilai (0-4)	3.31	14.48		Nilai SKM 82,68
TOTAL HASIL									34.59	
NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS									94.34	

<i>Penilaian</i>	<i>Bobot</i>	<i>Penjelasan</i>	<i>Pilihan Jawaban</i>	<i>Jawaban</i>	<i>Nilai</i>	<i>%</i>	<i>Catatan/Keterangan/Penjelasan</i>
------------------	--------------	-------------------	------------------------	----------------	--------------	----------	--------------------------------------